

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2024
DIPA 005.04.401201**

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta
DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta
Telp. 0274-552997
e-mail : admin@pa-yogyakarta.net

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu entitas di bawah Mahkamah Agung yang juga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Sekretaris,

Taslim, S.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	48

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 20 Februari 2025
Sekretaris,

Taslim, S.H.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahunan Unaudited Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.89.013.300,- atau mencapai 90,78 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.98.055.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.105.631.600,- atau mencapai 99,89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.105.750.000,-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.444.283,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.5.444.283,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.5.444.283,-

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.89.013.300,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.107.289.764,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.18.276.464,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(18.276.464,-)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp.3.566.447,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(18.276.464,-) ditambah

dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 20.154.300,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.5.444.283,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Unaudited Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Cat	Th 2024				Th 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	98.055.000	89.013.300	(9.041.700)	90,78	88.577.000
Jumlah Pendapatan dan Hibah		98.055.000	89.013.300	(9.041.700)	90,78	88.577.000
Belanja	B.2					
Belanja Barang	B.2	105.750.000	105.631.600	(118.400)	99,89	103.756.250
Jumlah Belanja		105.750.000	105.631.600	(118.400)	99,89	103.756.250

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	5,444,283	3,566,447
Jumlah Aset Lancar		5,444,283	3,566,447
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	-	-
Gedung dan Bangunan	C.2.3	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		5,444,283	3,566,447
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6.1	5,444,283	3,566,447
JUMLAH EKUITAS		5,444,283	3,566,447
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5,444,283	3,566,447

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	89,013,300	88,577,000
JUMLAH PENDAPATAN		89,013,300	88,577,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	4,208,164	4,339,400
Beban Barang dan Jasa	D.4	87,000,000	91,350,000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16,081,600	9,856,250
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		107,289,764	105,545,650
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18,276,464)	(16,968,650)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18,276,464)	(16,968,650)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18,276,464)	(16,968,650)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	3,566,447	2,860,400
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18,276,464)	(16,968,650)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	20,154,300	17,674,697
EKUITAS AKHIR	E.5	5,444,283	3,566,447

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Agama Yogyakarta didirikan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berada di bawah Mahkamah Agung RI. Entitas berkedudukan di Jl. Ipda Tut Harsono No.53, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Yogyakarta berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Unaudited Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang berhubungan dengan tupoksi Peradilan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya :

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.105.750.000,-. Selama Tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta yang disebabkan oleh adanya penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi. Adapun perubahan tersebut :

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 16 Februari 2024
2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 April 2024
3. Revisi Ke-03 pada tanggal 3 Juni 2024
4. Revisi Ke-04 pada tanggal 15 Juli 2024
5. Revisi Ke-05 pada tanggal 14 Oktober 2024
6. Revisi Ke-06 pada tanggal 29 Oktober 2024 terdapat perubahan volume RO dari 25 menjadi 30 perkara dikarenakan adanya optimalisasi belanja

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024
(Revisi Ke-06)

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Setelah Revisi (Rp.)
Pendapatan		
Pendapatan PNB	98.055.000	98.055.000
Jumlah Pendapatan	98.055.000	98.055.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	105.750.000	105.750.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	105.750.000	105.750.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.89.013.300,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.89.013.300,- atau mencapai 90,78% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.98.055.000,-. Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Panitera Badan Peradilan	11.060.000	130.000	1,18
Pendapatan Ongkos Perkara	26.970.000	24.585.000	91,16
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	60.025.000	64.298.300	107,12
Jumlah	98.055.000	89.013.300	90,78

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen dibandingkan Tahunan TA 2023. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemungutan dan penyetoran pada akun Pendapatan Peradilan Lainnya sebesar 6,53 persen yang meliputi PNBP Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan, Pengambilan Produk Pengadilan, Eksekusi dan lainnya. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan pada akun Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Panitera Badan Peradilan sebesar 95,04 persen dikarenakan pada tahun 2024 pemungutan dan penyetoran akun tersebut hanya diterapkan pada salinan putusan ke dua dan seterusnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahunan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Panitera Badan Peradilan	130.000	2.620.000	(95,04)
Pendapatan Ongkos Perkara	24.585.000	25.600.000	(3,96)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	64.298.300	60.357.000	6,53
Jumlah	89.013.300	88.577.000	0,49

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Rp.105.631.600,-*

Realisasi Belanja Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahunan TA 2024 adalah sebesar Rp.105.631.600,- atau 99,89% dari anggaran belanja sebesar Rp.105.750.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahunan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	105.750.000	105.631.600	99,89
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	105.750.000	105.631.600	99,89
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	105.750.000	105.631.600	99,89

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,81 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya belanja barang dalam program prodeo, penyelesaian perkara cuma-cuma bagi Masyarakat tidak mampu dimana pada Semester 1 Tahun 2024 telah mencapai target volume yang ditetapkan pada DIPA.
2. Dilakukannya optimalisasi Belanja Barang dalam program prodeo, penyelesaian perkara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu dimana terdapat penambahan volume RO yang semula 25 perkara menjadi 30 perkara.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	105.631.600	103.756.250	1,81
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	105.631.600	103.756.250	1,81

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp.0,-*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Satker Pengadilan Agama Yogyakarta 401201 (DIPA 04) tidak menyelenggarakan pengelolaan Belanja Pegawai.

B.4. Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp.105.631.600,-*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.105.631.600,- dan Rp.103.756.250,-

Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,81 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2023.

Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Meningkatnya belanja barang dalam program prodeo, penyelesaian perkara cuma-cuma bagi Masyarakat tidak mampu dimana pada Semester 1 Tahun 2024 telah mencapai target volume yang ditetapkan pada DIPA.
2. Dilakukannya optimalisasi Belanja Barang dalam program prodeo, penyelesaian perkara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu dimana terdapat penambahan volume RO yang semula 25 perkara menjadi 30 perkara.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahunan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Persediaan	2.550.000	2.550.000	0
Belanja Jasa	87.000.000	91.350.000	(4,76)
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	16.081.600	9.856.250	63,16
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	105.631.600	103.756.250	1,81
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	103.756.250	103.756.250	1,81

B.5. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp.0,-*

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Satker Pengadilan Agama Yogyakarta 401201 (DIPA 04) tidak menyelenggarakan pengelolaan belanja modal di tahun 2024.

B.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp.0,-*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Satker Pengadilan Agama Yogyakarta 401201 (DIPA 04) tidak menyelenggarakan pengelolaan belanja bantuan sosial di Tahunan tahun 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp.5.444.283,-*

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.444.283,- dan Rp.3.566.447,-

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/ TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo rekening di bank yang merupakan biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Tahunan TA 2024 dan 2023 (dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya Setara Kas	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0,-*

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp.0,-

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0,-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Nihil	0	0
2.	Nihil	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Nihil	0	0
2.	Nihil	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Jk.
Pendek Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di
Muka
Rp.0,-

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel Rincian Beban Dibayar di Muka
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Nihil	0	0
Jumlah	0	0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp.0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih

Harus Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.10. Persediaan

Persediaan
Rp.5.444.283,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.444.283,- dan Rp.3.566.447,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan Tahunan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	5.444.283	3.566.447
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	5.444.283	3.566.447

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp.0,-*

Saldo Aset Tetap Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Di Tahun 2024, Satker Pengadilan Agama Yogyakarta 401201 (DIPA 04) tidak menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap.

C.2.1. Tanah

*Tanah
Rp.0,-*

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp.0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.0,-*

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.0,-*

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,-*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.0,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

C.3. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang
Rp.0,-*

Piutang Jangka Panjang Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp.0,-*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp.0,-*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0,-*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.4. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp.0,-*

Saldo Aset Lainnya Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp.0,-*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-Lain
Rp.0,-*

Aset Lain-lain per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Yogyakarta.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp.0,-

pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Tabel Rincian Kas Kewajiban Jangka Pendek
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Utang yang belum ditagihkan	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.0,-

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0,-

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas
Rp.5.444.283-*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.444.283,- dan Rp.3.566.447,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp.89.013.300,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.89.013.300,- dan Rp.88.577.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Panitera Badan Peradilan	130.000	2.620.000	(95,04)
Pendapatan Ongkos Perkara	24.585.000	25.600.000	(3,96)
Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	64.298.300	60.357.000	6,53
Jumlah	89.013.300	88.577.000	0,51

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp.0,-*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.4.208.164,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.208.164,- dan Rp.4.339.400,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.208.164	4.339.400	(3,02)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	4.208.164	4.339.400	(3,02)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.87.000.000,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.87.000.000,- dan Rp.91.350.000,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya pengurangan pagu anggaran yang sebanding dengan pengurangan atas beban barang dan jasa tersebut berupa Layanan Posbakum.

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Jasa Konsultan	87.000.000	91.350.000	(4,76)
Jumlah Beban	87.000.000	91.350.000	(4,76)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.0,-*

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.16.081.600,-*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp.16.081.600,- dan Rp.9.856.250,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan oleh penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemanggilan para pihak yang terdaftar dalam perkara prodeo, berperkara secara cuma-cuma. Ditambah dengan adanya optimalisasi anggaran belanja sehingga menambah volume RO yang semula 25 Perkara menjadi 30 perkara. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahunan TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.081.600	9.856.250	(63,16)
Jumlah Beban	16.081.600	9.856.250	(63,16)

Beban Perjalanan Dinas pada Tahunan TA. 2024 mengalami peningkatan sebesar 63,16% dibandingkan pada Tahunan TA 2023. Hal ini dikarenakan adanya penambahan alokasi anggaran DIPA untuk biaya perjalanan dinas dan adanya optimalisasi belanja barang berupa penambahan volume RO pada POK sehingga

bertambah pula perjalanan dinas yang dilakukan untuk pemanggilan pihak berperkara tersebut.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp.0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-*

Beban Bantuan Sosial Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.0,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp.0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

D.11. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

D.12. Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp.0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahunan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.3.566.447,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.3.566.447,- dan Rp.2.860.400,-

E.2. Surplus/Defisit-LO

*Defisit LO
(Rp.18.276.464,-)*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.18.276.464,- dan defisit Rp.16.968.650,- Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp.0,-*

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,-.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0,-*

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.1. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset Rp.0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

E.4.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp.0,-*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.4. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
Rp.0,-*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.20.154.300,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.20.154.300,- dan Rp.17.674.697,- .

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Transaksi Antar Entitas
Tahunan TA 2024*

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(89.013.300)
Ditagihkan ke Entitas Lain	105.631.600
Transfer Masuk	3.536.000
Transfer Keluar	0

Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	20.154.300

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp.89.013.300.-) sedangkan DKEL sebesar Rp.105.631.600,-

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.536.000,- terdiri dari:

Transfer Masuk Tahunan TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Persediaan	Badilag/ PTA. Yogyakarta	3.536.000
Jumlah			3.536.000

Transfer masuk tersebut berupa blanko Akta Cerai sebanyak 17 buku. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,-

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- . Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- .

E.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.5.444.283,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.444.283,- dan Rp.3.566.447,- .

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

1. Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dengan Nomor Rekening : 651544012011000 a.n. BPG 030 Satker Pengadilan Agama Yogyakarta QQ 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- .
2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dengan Nomor Rekening : 0245-01-002048-30-9 a.n. RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA

UTK BY PERKARA yang digunakan sebagai penampung biaya perkara dan uang titipan/ konsinyasi para pihak dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.413.106.050,-

F.3. Revisi DIPA

Terdapat 6 kali revisi sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu :

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 16 Februari 2024 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA.
2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 April 2024 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA.
3. Revisi Ke-03 pada tanggal 3 Juni 2024 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA.
4. Revisi Ke-04 pada tanggal 15 Juli 2024 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA.
5. Revisi Ke-05 pada tanggal 14 Oktober 2024 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA.
6. Revisi Ke-06 pada tanggal 29 Oktober 2024 dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan optimalisasi belanja barang dengan merubah volume RO semula 25 perkara menjadi 30 perkara.

F.4. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 165/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 menunjuk :

Pejabat Kuasa Pengguna : Taslim, SH
Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen : Vrawati Widjaya, S.H, M.H

Pejabat Penandatangan/ : Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.
Penguji SPM

Bendahara Pengeluaran : Arina Rahmانيar, S.Kom.

Bendahara Penerimaan : Novialita Pitaloka, S.T.

F.5. Pengungkapan Lain Berupa Titipan Pihak Ketiga

A. Keuangan Biaya Perkara

Keadaan keuangan biaya perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ditampung di bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dengan nomor rekening 0245-01-002048-30-9 atas nama RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA utk by perkara. Saldo per 31 Desember 2024 **Rp.413.106.050,-** dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Perkara dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Saldo Awal	Rp.	31.298.000
b. Jumlah Penerimaan	Rp.	28.640.000
c. Jumlah Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>31.670.500 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	28.267.500

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	22.810.200
b. Materai	Rp.	150.000
c. Simpan di Bank	Rp.	<u>413.106.050 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	482.727.450 (-)
Selisih	Rp.	454.459.950

Penjelasan Selisih :

1. Uang Titipan Biaya Eksekusi Rp. 67.197.950,-
2. Uang Titipan Konsinyasi Rp. 383.377.500,-
3. Selisih lebih perkara yang belum didaftar Rp.3.884.500,-

2. Biaya Konsinyasi dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp.	383.377.500
b. Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>0 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	383.377.500

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	0
b. Simpan di Bank	Rp.	<u>383.377.500 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	383.377.500

3. Biaya Eksekusi dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Buku :

a. Jumlah Penerimaan	Rp.	70.292.950
b. Jumlah Pengeluaran	Rp.	<u>3.095.000 (-)</u>
Saldo Pembukuan	Rp.	67.197.950

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	Rp.	37.469.400
b. Simpan di Bank	Rp.	<u>29.728.550 (+)</u>
Jumlah Kas	Rp.	67.197.950

B. Keuangan Biaya Proses

Saldo awal per 01 Januari 2024	Rp. 6.055.050
Penerimaan (Jan s.d. Des 2024)	<u>Rp. 99.000.000 (+)</u>
Jumlah penerimaan	Rp. 105.055.050
Pengeluaran (Jan s.d. Des 2024)	<u>Rp. 99.882.800 (-)</u>
Saldo per 30 Desember 2024	Rp. 5.172.250

DAFTAR LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 173/SEKPA.W12-A1/KU2.1/II/2024 Yogyakarta, 24 Februari 2025
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Pengiriman Laporan Keuangan
Semester II TA. 2024 UnAudited

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di Yogyakarta

Bersama ini kami kirimkan Laporan Keuangan Tingkat Satker periode Semester II Tahun Anggaran 2024 UnAudited pada satker Pengadilan Agama Yogyakarta (401199 dan 401201).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Taslim, S.H

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEMESTER II TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (401201) Pengadilan Agama Yogyakarta
Kode dan Nama UAPPAW : (0400) DI Yogyakarta
Kode dan Nama Eselon 1 : (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

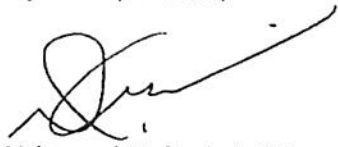
Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		✓
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidakesesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidakesesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidakesesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓

12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun "belum diregister")		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		N/A	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		N/A	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		N/A	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya

	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		N/A	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya

	Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akruai BLU?		N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,		N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213		N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan		N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  Muhammad Arief Jauhari, SAP NIP. 197802272006041002 Yogyakarta, 28 Februari 2025 Penelaah,  Novialita Pitaloka, S.T. NIP. 198611262011012011				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 401201

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
 Tgl Cetak : 19/02/25 6:50 AM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	98,055,000	89,013,300	(9,041,700)	91	96,619,000	88,577,000	8,042,000	92
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	98,055,000	89,013,300	(9,041,700)	91	96,619,000	88,577,000	8,042,000	92
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	98,055,000	89,013,300	(9,041,700)	91	96,619,000	88,577,000	8,042,000	92
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	105,750,000	105,631,600	(118,400)	100	106,350,000	103,756,250	2,593,750	98
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	105,750,000	105,631,600	(118,400)	100	106,350,000	103,756,250	2,593,750	98
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 401201

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 19/02/25 6:50 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	105,750,000	105,631,600	(118,400)	100	106,350,000	103,756,250	2,593,750	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 401201 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/25 6:51 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,125,000	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,125,000	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	87,000,000	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	87,000,000	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,625,000	16,200,000	16,081,600	0	16,081,600	99.27	118,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	16,625,000	16,200,000	16,081,600	0	16,081,600	99.27	118,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	105,750,000	105,750,000	105,631,600	0	105,631,600	99.89	118,400
	JUMLAH BELANJA	105,750,000	105,750,000	105,631,600	0	105,631,600	99.89	118,400

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 401201 **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/02/25 6:51 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	11,060,000	130,000	0	130,000	1.18
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	26,970,000	24,585,000	0	24,585,000	91.16
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	60,025,000	64,298,300	0	64,298,300	107.12
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	98,055,000	89,013,300	0	89,013,300	90.78
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	98,055,000	89,013,300	0	89,013,300	90.78
	JUMLAH PENDAPATAN	98,055,000	89,013,300	0	89,013,300	90.78

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 401201

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 19/02/2025 6:51 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,566,447	0
0.0	391111	Ekuitas	0	3,566,447
JUMLAH			3,566,447	3,566,447

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 19/02/25 2:44 AM
Tgl Cetak : 19/02/25 6:50 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65
JUMLAH ASET LANCAR	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65
JUMLAH ASET	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65
JUMLAH EKUITAS	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65
JUMLAH EKUITAS	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

TASLIM, SH.
NIP. 197001231995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 6:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,444,283	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	105,631,600
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	89,013,300	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,536,000
0.0	391111	Ekuitas	0	3,566,447
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	130,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	24,585,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	64,298,300
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	87,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,081,600	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,208,164	0
JUMLAH			201,747,347	201,747,347

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 19/02/25 2:44 AM
Tgl Cetak : 19/02/25 6:51 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	105,631,600
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	89,013,300	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	130,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	24,585,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	64,298,300
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,550,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	87,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,081,600	0
JUMLAH			194,644,900	194,644,900

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 19 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
TASLIM, SH.
197001231995031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 6:50 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	89,013,300	88,577,000	436,300	0.493
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	89,013,300	88,577,000	436,300	0.493
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	89,013,300	88,577,000	436,300	0.493
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	4,208,164	4,339,400	(131,236)	(3.024)
Beban Barang dan Jasa	87,000,000	91,350,000	(4,350,000)	(4.762)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	16,081,600	9,856,250	6,225,350	63.161
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 6:50 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	107,289,764	105,545,650	1,744,114	1.652
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(18,276,464)	(16,968,650)	(1,307,814)	7.707
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18,276,464)	(16,968,650)	(1,307,814)	7.707
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,276,464)	(16,968,650)	(1,307,814)	7.707

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 19/02/25 2:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/25 6:50 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,566,447	2,860,400	706,047	24.68
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,276,464)	(16,968,650)	(1,307,814)	7.71
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	20,154,300	17,674,697	2,479,603	14.03
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,877,836	706,047	1,171,789	165.96
EKUITAS AKHIR	5,444,283	3,566,447	1,877,836	52.65

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-005.04.2.401201/2024

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00002/DRPP/401201/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
	1. BP UP*)	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001

KAB. BANTUL, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran

ARINA RAHMANIAR, S.KOM

NIP. 198904202011012010

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 651544012011000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00002/DRPP/401201/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
------------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
-------------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
--	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

ARINA RAHMANIAR, S.KOM
NIP. 198904202011012010

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH.
NIP. 197001231995031001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 401201

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	651544012011000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 04	BRI Yogyakarta Cabang Kalamso	20	S-1654/WPB.12/KP.06/2020	23-06-2020	2024-12-24	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



ARINA RAHMANIAR, S.KOM
NIP. 198904202011012010

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-005.04.2.401201/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (030) Yogyakarta
Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 413.106.050,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00023/PKB/401201/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	438.503.550,00	31.428.500,00	56.826.000,00	413.106.050,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	438.503.550,00	31.428.500,00	56.826.000,00	413.106.050,00
B.	BP Selain Kas	438.503.550,00	31.428.500,00	56.826.000,00	413.106.050,00
	1. BP PNBP	0,00	6.826.000,00	6.826.000,00	0,00
	2. BP DPK	438.503.550,00	24.602.500,00	50.000.000,00	413.106.050,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	413.106.050,00
3.	Jumlah Kas	Rp	413.106.050,00 ^(*)

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	413.106.050,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	413.106.050,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	6.826.000,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	6.826.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	6.826.000,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	6.826.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	6.826.000,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00 karena -

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001

KAB. BANTUL , 02 Januari 2025

Bendahara Penerimaan



NOVIALITA PITALOKA

NIP. 198611262011012011

**Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Penerimaan
Periode Desember 2024**

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 413.106.050,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00023/PKB/401201/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	413.106.050
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	413.106.050
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	413.106.050
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	413.106.050
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	413.106.050
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	6.826.000
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	6.826.000
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	6.826.000
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
-
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
-

Bendahara Penerimaan


NOVIALITA PITALOKA
NIP. 198611262011012011

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


TASLIM, SH.
NIP. 197001231995031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 401201 (PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	024501002048309	RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA	BRI Cabang Katamso Yogyakarta	30	S- 1684/KPN.1501/202	28-10-2024	31-12-2024	413,106,050.00

Bendahara Penerimaan,



NOVIALITA PITALOKA

NIP. 198611262011012011

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

BERITA ACARA REKONSILIASI RPL
NOMOR BAR : 676/BPN-RPL GLP.401201/XII/2024

Pada Hari Selasa Tanggal 31 Desember 2024, telah diselenggarakan Rekonsiliasi Saldo RPL pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta periode bulan Desember 2024.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

- I. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

N o	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1	Nomor Rekening : 0245-01-002048-30-9 Nama Rekening : RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA Nama Bank : BRI Nomor Surat Izin Rekening : S- 4406/WPB.15/KP.01.04/2018	Rp. 413.106.050,-	Rp. 413.106.050,-	-

Penjelasan atas Selisih: -

- II. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Besar Akrua Akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 111825 (Operator GLP)

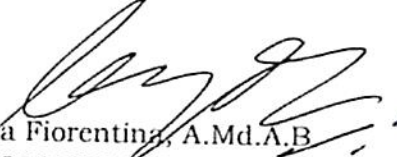
N o	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan pada Buku Besar Akrua Akun Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)	Selisih
1	Nomor Rekening : 0245-01-002048-30-9 Nama Rekening : RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA Nama Bank : BRI Nomor Surat Izin Rekening : S- 4406/WPB.15/KP.01.04/2018	Rp. 413.106.050,-	Rp. 413.106.050,-	-

Penjelasan atas Selisih: -

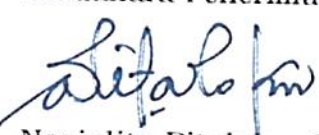
Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta kode satker 401201 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

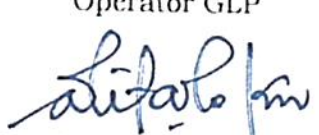
Kasir


Byolanda Fiorentina, A.Md.A.B.
NIP. 199812152022032006

Bendahara Penerimaan


Novialita Pitaloka, ST
NIP. 198611262011012011

Operator GLP


Novialita Pitaloka, ST
NIP. 198611262011012011

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran


TASLIM SH
NIP. 197001231995031001

Panitera


Drs. Abdul Adhim, AT
NIP. 196712281994031004

Buku Pembantu Bank
Periode Desember 2024

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (401201) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-005.04.2.401201/2024
Tahun Anggaran : 2024
KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2024			438.503.550,00
31/12/2024	00022/PKB/401201/2024	Penerimaan bulan Desember 2024	24.602.500,00	0,00	463.106.050,00
31/12/2024	00023/PKB/401201/2024	Pengeluaran bulan Desember 2024	0,00	50.000.000,00	413.106.050,00
Jumlah			24.602.500,00	50.000.000,00	413.106.050,00

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



TASLIM, SH.

NIP. 197001231995031001

KAB. BANTUL , 02 Januari 2025

Bendahara Penerimaan,

NOVIALITA PITALOKA

NIP. 198611262011012011



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
www.pa-yogyakarta.go.id, pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
Nomor : 675/SEKPA.W12-A1/PL1.2.5/XII/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Stock Opname barang persediaan di Gudang persediaan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta (401201) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Nominal
1.	Barang Konsumsi	: Rp. 5.444.283
2.	Amunisi	: Rp. -
3.	Bahan Untuk Pemeliharaan	: Rp. -
4.	Suku Cadang	: Rp. -
5.	Persediaan untuk Tujuan strategis/ berjaga-jaga	: Rp. -
6.	Pita Cukai dan Leges	: Rp. -
7.	Bahan Baku	: Rp. -
8.	Barang dalam proses/ setengah jadi	: Rp. -
9.	Tanah/ bangunan untuk dijual	: Rp. -
10.	Hewan dan Tanaman untuk dijual	: Rp. -

Sesuai hasil perhitungan, diketahui bahwa posisi barang persediaan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta per tanggal 31 bulan Desember tahun 2024 adalah sebesar total Rp. 5.444.283,- (*lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stock Opname dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian jumlah barang pada laporan rincian persediaan per bulan Desember tahun 2024 dengan kartu stock barang dan jumlah fisik barang persediaan;
2. Dari hasil stok opname tersebut diketahui bahwa tidak ada perbedaan jumlah barang antara jumlah fisik Barang Persediaan yang tercatat pada Kartu Stock Barang, maupun jumlah pada catatan di Aplikasi Sakti Modul Persediaan.
3. Barang Persediaan yang kondisinya sudah rusak/ using akan dihapuskan dari pencatatan pada tahun 2024.

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

Kepala Sub. Bagian Umum dan Operator Persediaan
Keuangan

Taslim, SH
NIP. 19700123.199503.1.001

Muhammad Arief Jauhari, S.AP
NIP. 19780227.200604.1.002

Catur Gunawan, S.E.
NIP. 19800826.200212.1.001

BERITA ACARA PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) BARANG
Per : 31 Desember 2024

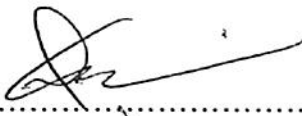
Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Opname Fisik barang persediaan pada Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta (401201) dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Rupiah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	1010399999000025	Blanko Akta Cerai	30	Baik	5.444.283
Total					5.444.283

Petugas Opname Barang :

- 1. Muhammad Arief Jauhari, S.AP
- 2. Catur Gunawan, S.E.

TTD


.....

.....

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 KODE UAKPB : 005.04.0400.401201

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	
000001	Bolpoin V-5	0
000002	Bolpoin Kokoro 0.5 black zebra	0
000003	pensil	0
1010301006	Ordner Dan Map	0
000001	Map Perkara	0
000002	Busines file bfx-100f F4 Inter	0
1010301010	Alat Perekat	0
000001	Lem Stik Pronto	0
1010301012	Staples	0
000001	Stapler No. 10	0
1010301013	Isi Staples	0
000001	Isi Staples	0
1010302001	Kertas HVS	0
000001	Kertas A4 70 Gram	0
1010302002	Berbagai Kertas	0
000001	Stiker	0
1010302004	Amplop	0
000001	Amplop	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000025	Blanko Akta Cerai	5,444,283
000028	Materai	5,444,283
		0
Jumlah per Akun		5,444,283
Total Jumlah		5,444,283

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
 2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 31-12-2024
 Kuasa Pengguna Barang

Sekretaris



Taslim, SH.

197001231995031001

Yogyakarta, 31-12-2024
 Petugas Pengelola Persediaan

Catur Gunawan, S.E.
 198008262002121001

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2024-12

KEMENTERIAN
ESELON 1
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
JENIS KEWENANGAN

: 005
: 04
: 0400
: 401201
: KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Kantor Daerah

Tanggal
Halaman

:
:

17-01-2025
1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2024	001	Jurnal Eliminasi Saldo RPL Akhir Tahun 2024	401201.030.111825.0050400.0000000.0000000000.000000.2.0401.2.0000000.000000	111825	AKRUAL	0	413,106,050	Sudah
31-12-2024	001	Jurnal Eliminasi Saldo RPL Akhir Tahun 2024	401201.030.212192.0050400.0000000.0000000000.000000.2.0401.2.0000000.000000	212192	AKRUAL	413,106,050	0	Sudah
						413,106,050	413,106,050	

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Peradilan Agama
 Wilayah : DI Yogyakarta
 Satuan Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 31/12/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Eliminasi Saldo RPL Akhir Tahun 2024

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☒ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	212192 - Dana Pihak Ketiga	413.106.050	
	K	111825 - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		413.106.050
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Jurnal Manual Eliminasi Saldo RPL Bulan Desember 2024

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Muhammad Arief Jauhari, SAP

Tanggal : 31 Desember 2024

Disetujui oleh :
KPA

Taslim, SH

Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Novialita Pitaloka, ST

Tanggal : 31 Desember 2024

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Lampiran VI

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0400) Daerah Istimewa Yogyakarta
 Satuan Kerja : (401201) Pengadilan Agama Yogyakarta

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	0400	Daerah Istimewa Yogyakarta	401201	Pengadilan Agama Yogyakarta	0	413.106.050	BRI Cabang Katamso 024501002048309 an. RPL 030 PDT PA YOGYAKARTA UTK BY PERKARA	413.106.050	digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

Yogyakarta, 31 Desember 2024
 Sekretaris PA Yogyakarta

Taslim, SH

NIP.197001231995031001

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

. Ipda Tut Harsono No.53, Kel, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 5516
Telepon (0274)552997, Fax (0274)552998 Homepage : <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net ; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

REGISTER PENUTUPAN KAS

BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA

PERIODE : 01 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Buku Keuangan Induk Pengadilan Agama Yogyakarta, ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

MENURUT BUKU :

a. Saldo Awal	Rp	31.298.000
b. Jumlah Penerimaan	Rp	28.640.000
c. Jumlah Pengeluaran	Rp	31.670.500
Saldo Pembukuan (A)	Rp	28.267.500

MENURUT KAS :

a. Uang Tunai	Rp	69.471.400
b. Meterai	Rp	150.000
c. Saldo Bank	Rp	413.106.050
Jumlah (B)	Rp	482.727.450
Selisih (B-A)		

Rp 454.459.950

Penjelasan Selisih :

1. Uang Biaya Eksekusi	Rp	67.197.950
2. Uang Titipan Konsinyasi	Rp	383.377.500
3. Selisih lebih Perkara Yang Belum di daftar	Rp	3.884.500
4. PNPB Salput ecourt belum di setor	Rp	-
	Rp	454.459.950

Perincian Uang Tunai terdiri dari :

a. Uang Kertas Rp	100.000	x	674	lembar	=	Rp	67.400.000
b. Uang Kertas Rp	50.000	x	0	lembar	=	Rp	-
c. Uang Kertas Rp	20.000	x	3	lembar	=	Rp	60.000
d. Uang Kertas Rp	10.000	x	1	lembar	=	Rp	10.000
e. Uang Kertas Rp	5.000	x	0	lembar	=	Rp	-
f. Uang Kertas Rp	2.000	x	0	lembar	=	Rp	-
g. Uang Kertas Rp	1.000	x	1	lembar	=	Rp	1.000
h. Uang Logam Rp	500	x	0	keping	=	Rp	-
i. Uang Logam Rp	200	x	2	keping	=	Rp	400
j. Uang Logam Rp	100	x	0	keping	=	Rp	-
k. Uang Logam Rp	50	x	0	keping	=	Rp	-
Jumlah					=	Rp	67.471.400

Mengetahui
Ketua

Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

Panitera

Drs. Abdul Adhim. AT

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

. Ipda Tut Harsono No.53, Kel, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 5516
Telepon (0274)552997, Fax (0274)552998 Homepage : <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net ; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

PENUTUPAN BUKU KEUANGAN BIAYA EKSEKUSI PERIODE : 01 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Buku Keuangan Eksekusi Pengadilan Agama Yogyakarta, ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

MENURUT BUKU :

a. Saldo Awal	Rp	70.292.950
b. Jumlah Penerimaan	Rp	-
c. Jumlah Pengeluaran	Rp	3.095.000
Saldo Pembukuan (A)	Rp	67.197.950

MENURUT KAS :

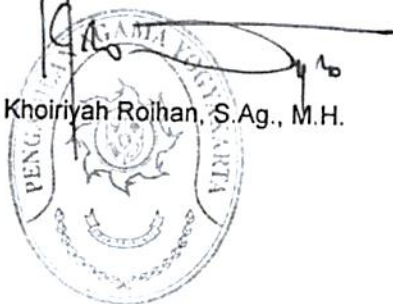
a. Uang Tunai	Rp	-
b. Saldo Bank	Rp	67.197.950
Jumlah (B)	Rp	67.197.950

Perincian Uang Tunai terdiri dari :

a. Uang Kertas Rp	100.000	x	0	lembar	= Rp	-
b. Uang Kertas Rp	50.000	x	0	lembar	= Rp	-
c. Uang Kertas Rp	20.000	x	0	lembar	= Rp	-
d. Uang Kertas Rp	10.000	x	0	lembar	= Rp	-
e. Uang Kertas Rp	5.000	x	0	lembar	= Rp	-
f. Uang Kertas Rp	2.000	x	0	lembar	= Rp	-
g. Uang Kertas Rp	1.000	x	0	lembar	= Rp	-
h. Uang Logam Rp	500	x	0	keping	= Rp	-
i. Uang Logam Rp	200	x	0	keping	= Rp	-
j. Uang Logam Rp	100	x	0	keping	= Rp	-
k. Uang Logam Rp	50	x	0	keping	= Rp	-
Jumlah					= Rp	-

Mengetahui
Ketua

Khoiriyah Rohan, S.Ag., M.H.



Panitera

Drs. Abdul Adhim. AT

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

. Ipda Tut Harsono No.53, Kel, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 5516
Telepon (0274)552997, Fax (0274)552998 Homepage : <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net ; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

PENUTUPAN BUKU KEUANGAN KONSINYASI PERIODE : 01 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Buku Keuangan Konsinyasi Pengadilan Agama Yogyakarta, ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

MENURUT BUKU :

a. Saldo Awal	Rp	383.377.500
b. Jumlah Penerimaan	Rp	-
c. Jumlah Pengeluaran	Rp	-
Saldo Pembukuan (A)	Rp	383.377.500

MENURUT KAS :

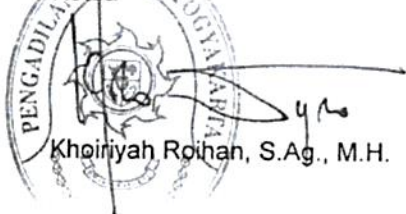
a. Uang Tunai	Rp	-
b. Saldo Bank	Rp	383.377.500
Jumlah (B)	Rp	383.377.500

1. Uang Titipan Nafkah Mut'ah (belum diambil) No. 550/Pdt.G/2011/PA. Yk. Jo. No. 32/Pdt.G/2012/PTA. Yk. Jo. No. 436 K/AG/2013 yang disetor ke PA. Yogyakarta tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (Uang di Bank)
2. Uang Titipan T. Eksekusi (bagian pihak berperkara yang belum diambil) No. 2/Pdt.Eks/2014/PA. Yk. yang disetor ke PA. Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp. 363.377.500.- (Uang di Bank)

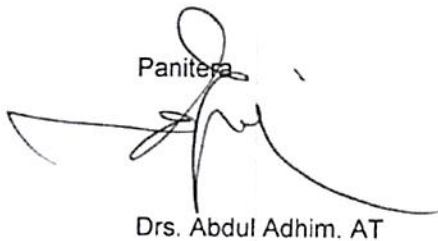
Perincian Uang Tunai terdiri dari :

a. Uang Kertas Rp	100.000	x	0	lembar	= Rp	-
b. Uang Kertas Rp	50.000	x	0	lembar	= Rp	-
c. Uang Kertas Rp	20.000	x	0	lembar	= Rp	-
d. Uang Kertas Rp	10.000	x	0	lembar	= Rp	-
e. Uang Kertas Rp	5.000	x	0	lembar	= Rp	-
f. Uang Kertas Rp	2.000	x	0	lembar	= Rp	-
g. Uang Kertas Rp	1.000	x	0	lembar	= Rp	-
h. Uang Logam Rp	500	x	0	keping	= Rp	-
i. Uang Logam Rp	200	x	0	keping	= Rp	-
j. Uang Logam Rp	100	x	0	keping	= Rp	-
Jumlah					= Rp	-

Mengetahui
Ketua


Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

Panitera


Drs. Abdul Adhim. AT